

KTT G-20 DAN KEPENTINGAN INDONESIA

Simela Victor Muhamad

7

Abstrak

KTT G-20 yang berlangsung di Osaka, Jepang pada akhir Juni 2019 diselenggarakan di tengah keprihatinan mendalam terhadap perang dagang AS-China. KTT telah menghasilkan the G-20 Osaka Leaders' Declaration, yang memuat pernyataan sikap bersama dari para pemimpin negara-negara anggota G-20 tentang pentingnya membangun kebijakan perdagangan yang bebas, adil, nondiskriminatif, dan transparan. Tulisan ini menjelaskan secara singkat bahwa KTT G-20 tidak hanya menjadi forum bagi penyebaran pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, tetapi di situ juga terdapat negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, yang memiliki kepentingan untuk diperhatikan dan diperjuangkan, salah satunya Indonesia. Kepentingan Indonesia antara lain adalah memajukan perekonomian negara berkembang, menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan, serta mengedepankan pendekatan konstruktif dalam mengatasi persoalan yang dihadapi anggota G-20. Indonesia juga berkepentingan untuk menjadikan G-20 sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. DPR RI, melalui aktivitas diplomasi parlemen, sudah seharusnya juga menjadi bagian yang ikut memperjuangkan kepentingan Indonesia tersebut.

Pendahuluan

Negara-negara anggota G-20 baru saja menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Osaka, Jepang. KTT yang diselenggarakan pada tanggal 28-29 Juni 2019 tersebut telah menghasilkan *the G-20 Osaka Leaders' Declaration*, yang memuat pernyataan sikap bersama dari para pemimpin negara-negara anggota G-20, yang antara lain bersepakat untuk membangun kebijakan perdagangan yang bebas, adil, nondiskriminatif, transparan,

dan stabil (*thejakartapost.com.*, 30 Juni 2019). KTT G-20 tersebut diselenggarakan di tengah keprihatinan mendalam terhadap perang dagang Amerika Serikat (AS)-China yang menyebabkan pertumbuhan global terhambat.

Perlu dipahami, G-20 tidak hanya menjadi forum bagi penyebaran pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, tetapi di situ juga terdapat negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, salah satunya adalah Indonesia. Oleh karena itu,



kehadiran Presiden Joko Widodo di KTT G-20 Osaka, Jepang, telah dimanfaatkan oleh Indonesia untuk menyampaikan pandangannya yang berkaitan dengan tantangan ekonomi global. Salah satunya adalah perlunya memperkuat norma dan hukum internasional yang disepakati bersama dalam membangun kerja sama ekonomi yang adil dan nondiskriminatif. Pandangan Indonesia tersebut sesungguhnya juga menjadi kepentingan negara-negara berkembang yang selama ini merasakan ketidakadilan dalam praktik perdagangan global, terutama dengan negara-negara maju. Melalui tulisan ini akan dibahas secara singkat pelaksanaan KTT G-20 Osaka, Jepang, yang masih diwarnai oleh isu perang dagang, dan kepentingan Indonesia di forum tersebut.

KTT G-20 Osaka

Jika memerhatikan KTT G-20 yang dilaksanakan di Osaka, Jepang, akhir Juni 2019 lalu, terlihat bahwa negara-negara anggota yang hadir, selain bersepakat dan menaruh harapan agar G-20 dapat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia, juga membawa misi dan kepentingan masing-masing. China melalui Presiden Xi Jinping, di sela-sela KTT, menyampaikan kecaman terhadap segala bentuk proteksionisme dan praktik intimidasi ekonomi, terutama yang dilakukan AS, karena telah memicu konflik perdagangan dan blokade ekonomi (*The New York Times*, 1 Juli 2019). China, yang pertumbuhan ekonominya tengah melambat, memang sangat berkepentingan

menyuarakan hal itu dalam KTT G-20 Osaka, dengan harapan bisa menggugah negara-negara yang selama ini berkepentingan dengan China (terutama negara-negara di Asia Timur), untuk juga mengkritisi AS.

Sebaliknya AS, meskipun pada akhirnya bersedia menurunkan tensi konflik dagangnya dengan China, di KTT G-20 Osaka secara tidak langsung masih mengkritik China karena dianggap belum sepenuhnya terbuka dalam membicarakan hubungan dagangnya dengan AS (*bbc.com.*, 28 Juni 2019). Sementara Jepang, sebagai tuan rumah KTT, yang juga memiliki kepentingan ekonomi dengan China dan AS, sangat berharap situasi perang dagang AS-China tidak terus terjadi, karena dampaknya juga dirasakan oleh Jepang (*cnbc.com.*, 28 Juni 2019). Rusia, yang juga memiliki kepentingan dalam perekonomian global, mengkritik AS karena dianggap telah mempraktikkan kebijakan ekonomi sepihak yang hanya mementingkan dirinya sendiri (*The New York Times*, 29 Juni 2019). Oleh karena itu, dihasilkannya *Leaders' Declaration* dalam KTT G-20 patut diapresiasi, paling tidak untuk sementara, guna meredakan tensi perang dagang, khususnya antara AS dan China.

Uraian sekilas tentang KTT G-20 Osaka di atas, yang didominasi oleh isu perang dagang AS-China, menunjukkan bahwa negara-negara besar tertentu dengan berbagai kepentingannya masih menjadi pemain utama dalam menentukan arah kerja sama ekonomi global. Situasi seperti ini, sudah tentu, perlu disikapi secara kritis oleh negara-negara

anggota G-20 lainnya, termasuk Indonesia, yang juga memiliki kepentingan untuk menjadikan forum G-20 sebagai penggerak utama perekonomian global dan membawa manfaat bagi seluruh anggotanya. Sejumlah negara yang termasuk dalam anggota G-20, antara lain adalah AS, Argentina, Brazil, Indonesia, Australia, Kanada, Meksiko, dan Turki. Selain itu, Korea Selatan, Jepang, China, Jerman, Inggris, India, Arab Saudi, Afrika Selatan, Italia, Perancis, Rusia, dan satu organisasi regional yaitu Uni Eropa. KTT Osaka dijadikan momentum oleh G-20 untuk kembali membangun komitmen kerja sama ekonomi di antara sesama anggotanya.

Kepentingan Indonesia

Sebagai forum ekonomi utama dunia, G-20 memiliki posisi strategis, karena secara kolektif mewakili sekitar 65 persen penduduk dunia, 79 persen perdagangan global, dan setidaknya 85 persen perekonomian dunia (g20.org). Data ini menunjukkan potensi besar yang dimiliki oleh G-20 untuk membangun kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan di antara sesama anggotanya. Namun demikian, di tengah data yang menjanjikan tersebut, terkadang juga muncul praktik ekonomi dari negara tertentu yang bisa mengganggu hubungan ekonomi antarsesama negara G-20. Di sini Indonesia, sebagai salah satu negara anggota, berkepentingan untuk menjaga agar perdagangan global (termasuk antarsesama anggota G-20) berlangsung dengan baik. Indonesia perlu menegaskan bahwa tindakan unilateral dari

suatu negara yang mengabaikan kepentingan bersama, seperti terlihat dalam kasus perang dagang AS-China, adalah tidak dapat dibenarkan karena tidak sejalan dengan tujuan pembentukan G-20 yang mengedepankan kerja sama.

Indonesia juga berkepentingan, dan ini yang paling utama, untuk memajukan perekonomian negara berkembang, dan menjaga terciptanya perekonomian global yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk itu, Indonesia perlu terus mempromosikan pendekatan konstruktif dan multilateralisme, sebagai karakteristik dasar G-20, dalam mengembangkan kerja sama ekonomi, terutama untuk menghadapi dominasi negara besar atau kelompok regional tertentu (seperti AS dan Uni Eropa). Sejalan dengan hal itu, Indonesia juga perlu mengambil peran konstruktif untuk memperkuat koordinasi kebijakan di antara sesama negara anggota G-20 guna terciptanya sistem perekonomian global yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang. Karena tidak tertutup kemungkinan, dalam kerangka memajukan perekonomian nasionalnya masing-masing, sesama negara anggota G-20 akan berkompetisi untuk merebut pasar global.

Pesaing Indonesia di kawasan yang perlu diperhatikan antara lain adalah China dan India. Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di antara negara G-20 pada Kuartal I tahun 2019, yakni sebesar 5,07 persen, sementara China 6,4 persen, dan India 5,8 persen (*cnnindonesia.com.*, 28 Juni 2019). Data ini menunjukkan bahwa negara dengan penduduk terbesar

pertama dan kedua di dunia, China dan India (dengan pertumbuhan ekonominya yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia), perlu dicermati dan dipahami setiap kebijakan ekonomi internasionalnya agar Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan ekonomi global dengan kedua negara tersebut. Pada saat bersamaan, Indonesia juga perlu membangun kerja sama konstruktif, yang dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional, dengan China dan India serta negara-negara anggota G-20 lainnya.

Sejalan dengan dinamika dan diskusi yang berkembang di KTT G-20 Osaka, Indonesia juga berkepentingan untuk menjadikan G-20 sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi global. Hal tersebut perlu didorong Indonesia dengan memperkuat prinsip-prinsip dasar yang mendukung sistem perdagangan bebas, adil, dan non-diskriminaif. Sejalan dengan hal itu, upaya perbaikan sistem penyelesaian sengketa di Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*) menjadi hal yang sangat penting dan perlu diperjuangkan. Indonesia juga perlu menegaskan kembali pentingnya membangun prinsip-prinsip yang solid untuk menuntun dunia ke masa depan perekonomian yang lebih baik. Hal tersebut didasari oleh keanggotaan pada G-20, yang telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam perekonomian global dan ikut menentukan kerangka kebijakan perekonomian dunia.

Kepentingan Indonesia lainnya adalah meningkatkan

pencapaian ekonomi melalui sektor investasi dan perdagangan, dengan cara meningkatkan nilai ekspor melalui kerja sama dalam G-20, mendorong kontribusi investasi dan perdagangan di dalam pertumbuhan global, memanfaatkan jaringan global, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan perdagangan bebas, dan melakukan penguatan terhadap sistem perdagangan multilateral. Untuk mendukung pencapaian kepentingan Indonesia di G-20 tersebut, DPR RI harus menjadi bagian yang ikut memperjuangkannya melalui aktivitas diplomasi parlemen, baik secara bilateral melalui pertemuan dengan parlemen negara sahabat dari negara G-20, maupun melalui pertemuan-pertemuan multilateral di berbagai forum antarparlemen internasional dan regional, seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan *Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF)*.

Penutup

Dari pelaksanaan KTT G-20 di Osaka, Jepang, terlihat bahwa negara-negara besar tertentu masih menjadi pemain utama dalam menentukan arah kerja sama ekonomi global. Situasi seperti ini, sudah tentu, perlu disikapi secara kritis oleh negara-negara anggota G-20 lainnya, termasuk Indonesia, karena G-20 tidak hanya menjadi forum bagi penyebaran pengaruh dan kepentingan negara-negara besar, tetapi di situ juga terdapat negara-negara berkembang yang menjadi anggotanya, yang memiliki kepentingan untuk diperhatikan dan diperjuangkan. Keanggotaan

di forum G-20 tidak cukup diterima Indonesia begitu saja, dan secara berkala hadir mengikuti pertemuan-pertemuannya, tetapi juga harus dimanfaatkan untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Kepentingan Indonesia antara lain adalah turut memajukan perekonomian negara berkembang, menjaga terciptanya perekonomian global yang inklusif dan berkelanjutan, serta turut mengedepankan pendekatan konstruktif dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh anggota G-20. Indonesia juga perlu mengambil peran konstruktif untuk memperkuat koordinasi kebijakan di antara sesama anggota G-20 agar tercipta sistem perekonomian global yang kuat dan berkelanjutan, serta terjaganya kompetisi yang fair di antara sesama anggota G-20 dalam merebut pasar global. Dalam kerangka itu, Indonesia perlu membangun kerja sama konstruktif, yang dapat memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional dengan sesama negara anggota G-20 lainnya. DPR RI, melalui aktivitas diplomasi parlemen, sudah seharusnya menjadi bagian yang ikut memperjuangkan kepentingan Indonesia tersebut.

Referensi

- "About G20", g20.org, <http://g20.org.tr/about-g20/>, diakses 28 Juni 2019.
- "G-20 Membawa Harapan Baru", *Kompas*, 30 Juni 2019, hal. 1 dan 11.
- "G20 leaders' joint declaration again omits protectionism", *thejakartapost.com.*, 30 Juni 2019, [https://www.](https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/30/g20-leaders-joint-declaration-again-omits-protectionism.html)

[thejakartapost.com/news/2019/06/30/g20-leaders-joint-declaration-again-omits-protectionism.html](https://www.thejakartapost.com/news/2019/06/30/g20-leaders-joint-declaration-again-omits-protectionism.html), diakses 1 Juli 2019.

"G-20 Osaka Sukses Besar", *Kompas*, 1 Juli 2019, hal. 4.

"Global Growth to Weaken to 2.6% in 2019, Substantial Risks Seen", *worldbank.org.*, 4 Juni 2019, <https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2019/06/04/global-growth-to-weaken-to-26-in-2019-substantial-risks-seen>, diakses 2 Juli 2019.

"Indonesia Bawa Usulan IDEA Hub di KTT G20", *kemenlu.go.id.*, 28 Juni 2019, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/408/berita/indonesia-bawa-usulan-idea-hub-di-ktt-g20>, diakses 2 Juli 2019.

"Japan's Abe hopes U.S., China resolve trade war through constructive talks", *cnbc.com.*, 28 Juni 2019, <https://www.cnbc.com/2019/06/28/reuters-america-japans-abe-hopes-u-s-china-resolve-trade-war-through-constructive-talks.html>, diakses 2 Juli 2019.

"Melihat 'Taji' Indonesia di Antara Negara Raksasa G-20", *cnnindonesia.com.*, 28 Juni 2019, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190628134408-532-407329/melihat-taji-indonesia-di-antara-negara-raksasa-g20>, diakses 1 Juli 2019.

"Putin says U.S., unilateralism hurts global trade", *The New York Times*, 29 Juni 2019, hal. 6.

"Trade truce doesn't end threat to China's trade position", *The New York Times*, 1 Juli 2019, hal. 1.

“US accuses China of backtracking on trade deal”, [bbc.com.](https://www.bbc.com/news/business-48173020), 28 Juni 2019, <https://www.bbc.com/news/business-48173020>, diakses 2 Juli 2019.



Simela Victor Muhammad
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain "Kepentingan Maritim China dan Kawasan Respons Indonesia." (bagian dari buku Agenda Poros Maritim, Penerbit Azza Grafika, 2015); "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di Jurnal Politica Vol 7 No. 1, Mei 2016) dan "Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.